

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG INOVASI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA
BANDAR LAMPUNG: PERSEPEKTIF KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN
TANTANGAN IMPLEMENTASI**

Tugas Metode Penelitian Administrasi Publik

Oleh

HAULIFIA BUNGA PINATA

NPM 2416041107



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Pengertian dan konsep dasar kebijakan publik	14
2.3 Implementasi kebijakan publik	16
2.4 Konsep inovasi dalam UMKM	19
2.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM.....	21
2.6 Tantangan Implementasi Kebijakan Dukungan UMKM	22
2.7 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	32
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
DAFTAR PUSTAKA	36

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masa

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi esensial dan pilar utama dalam struktur perekonomian global, khususnya di negara-negara berkembang dan transisi seperti Indonesia. Perannya melampaui sekadar kontribusi statistik ekonomi; UMKM adalah fasilitator fundamental bagi pembangunan inklusif, penyerapan tenaga kerja yang masif dan tersebar merata, pengentasan kemiskinan struktural, pemerataan distribusi kesejahteraan yang berkeadilan, dan bahkan sebagai agen stabilisasi sosial-politik di tengah gejolak global. Di kancah nasional, data terbaru menggarisbawahi dominasi UMKM dengan kontribusi mencapai lebih dari 60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan secara signifikan menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 97% dari total angkatan kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Angka-angka statistik ini bukan sekadar deretan digit statis; mereka merepresentasikan sebuah ekosistem ekonomi yang dinamis, organik, dan menegaskan bahwa vitalitas, pertumbuhan, serta keberlanjutan UMKM adalah prasyarat fundamental bagi stabilitas makroekonomi, resiliensi sistem ekonomi terhadap guncangan, dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Kemampuan UMKM untuk bertahan, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar, dan bahkan bertumbuh di tengah badai menunjukkan kapasitasnya sebagai benteng pertahanan ekonomi yang kokoh dan penyangga sosial yang esensial di saat-saat paling genting sekalipun. Kondisi ini secara implisit dan eksplisit menekankan bahwa setiap strategi pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mengabaikan, meremehkan, atau kurang memberikan perhatian strategis dan berkelanjutan pada sektor UMKM, berisiko tinggi untuk gagal dalam menciptakan pertumbuhan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus akan membuat perekonomian menjadi rentan terhadap tekanan eksternal yang tak terduga di masa mendatang, berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki karakteristik demografi dan ekonomi yang sangat dinamis, kompleks, serta multisektoral. Kota ini berfungsi sebagai magnet sekaligus pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi regional, menarik investasi, arus urbanisasi, dan migrasi tenaga kerja, dengan sektor UMKM yang tidak hanya tumbuh secara kuantitas tetapi juga menunjukkan diversifikasi yang kaya dan inovatif. Data terbaru yang dihimpun dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung (per akhir tahun 2024), mengindikasikan bahwa terdapat lebih dari 118.533 unit UMKM aktif yang beroperasi dan tersebar di berbagai sektor vital. Sektor-sektor ini meliputi perdagangan eceran modern dan tradisional, jasa kuliner yang berkembang pesat (makanan dan minuman khas Lampung seperti keripik pisang, kopi robusta, pempek, aneka olahan laut), industri kreatif (fashion, kerajinan tangan, batik Lampung dengan motif siger, produk-produk daur ulang), hingga sektor-sektor manufaktur skala mikro yang menghasilkan produk khas daerah dengan nilai tambah signifikan.

Keberadaan UMKM ini tidak hanya menciptakan geliat ekonomi lokal yang *vibrant* dan menciptakan *multiplier effect* yang signifikan dalam perputaran uang dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan ekosistem bisnis yang lebih kuat, membuka peluang kewirausahaan bagi individu dan kelompok masyarakat (terutama perempuan dan pemuda yang kerap menjadi kelompok rentan terhadap pengangguran), serta secara langsung berkontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi kota. Kontribusi UMKM terhadap PDB Kota Bandar Lampung diperkirakan mencapai lebih dari 50%, mencerminkan dominasinya yang tak terbantahkan dalam struktur ekonomi lokal dan pentingnya sektor ini dalam penciptaan nilai tambah, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Namun, di tengah gemuruh percepatan transformasi digital global yang tak terhindarkan, disrupsi teknologi yang konstan, dan intensitas persaingan pasar yang semakin ketat baik dari produk domestik maupun impor, UMKM di Kota Bandar Lampung menghadapi imperatif mendesak untuk tidak hanya sekadar bertahan hidup atau tumbuh secara linear, melainkan juga harus mampu berinovasi secara berkelanjutan, strategis, dan adaptif. Tanpa kapasitas untuk berinovasi secara

progresif, UMKM berisiko tinggi untuk mengalami stagnasi, kehilangan relevansi di pasar, kehilangan pangsa pasar yang vital, dan akhirnya tergerus oleh kompetitor yang lebih lincah dan adaptif, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berujung pada menurunnya daya saing ekonomi daerah.

Konsep “inovasi” dalam konteks UMKM modern telah berevolusi jauh melampaui pengertian sempit tentang penciptaan produk baru semata. Inovasi kini merangkum spektrum yang luas dan multidimensional, mencakup adaptasi progresif terhadap teknologi digital dalam seluruh rantai nilai bisnis. Ini dimulai dari proses pemasaran yang lebih cerdas dan menjangkau audiens yang lebih luas (misalnya, penggunaan media sosial sebagai platform promosi dan *branding* yang personal dan interaktif, adopsi *e-commerce* dan *marketplace* lokal/nasional/global yang terintegrasi, pemanfaatan *influencer marketing* untuk jangkauan yang lebih luas dan target pasar spesifik), optimalisasi jalur distribusi melalui platform logistik digital yang efisien dan transparan, peningkatan efisiensi operasional melalui penerapan perangkat lunak manajemen inventaris atau akuntansi berbasis *cloud* yang terjangkau dan *user-friendly*, hingga pengembangan model bisnis yang secara fundamental lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan cepat dalam selera, preferensi, dan kebutuhan konsumen yang semakin terinformasi dan menuntut.

Sayangnya, fenomena digital *divide* atau kesenjangan digital masih sangat terasa di kalangan UMKM di Bandar Lampung, yang menciptakan ketimpangan signifikan dalam daya saing. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi yang memadai (misalnya, konektivitas internet berkecepatan tinggi yang belum merata di seluruh wilayah kota, terutama di daerah pinggiran atau sentra-sentra produksi UMKM tradisional), rendahnya literasi digital di kalangan sebagian besar pelaku UMKM terutama generasi yang lebih tua atau yang beroperasi di sektor tradisional dengan modal terbatas serta kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik dalam memanfaatkan platform digital, menganalisis data pasar, mengelola kampanye pemasaran digital, dan mengembangkan produk berbasis digital, menjadi penghambat krusial.

Survei dan observasi awal menunjukkan bahwa meskipun potensi pasar *e-commerce* sangat besar dan menawarkan akses pasar yang tak terbatas, hanya

sebagian kecil UMKM lokal yang mampu mengintegrasikan bisnisnya secara efektif ke dalam ekosistem digital secara komprehensif, seringkali hanya terbatas pada penggunaan aplikasi perpesanan instan untuk transaksi sederhana tanpa memanfaatkan fitur-fitur lanjutan seperti analisis data pelanggan, optimasi SEO (*Search Engine Optimization*), atau personalisasi penawaran. Tanpa pendekatan yang adaptif, kontekstual, dan inklusif, program dukungan pemerintah berisiko tinggi untuk menjadi tidak efektif dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, justru memperlebar jurang kesenjangan digital di antara pelaku UMKM dan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang lebih parah, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Melihat urgensi dan kompleksitas kondisi tersebut, peran aktif pemerintah daerah menjadi sangat vital, strategis, dan tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah daerah memiliki mandat konstitusional dan moral untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan publik oleh pemerintah daerah merupakan manifestasi konkret dari fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, regulasi ekonomi, dan pembangunan regional. Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui berbagai perangkat daerahnya seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta badan-badan koordinasi lainnya, telah menginisiasi sejumlah kebijakan dan program dukungan yang bertujuan spesifik untuk mendorong UMKM agar lebih inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan. Beberapa inisiatif yang menonjol meliputi fasilitasi akses permodalan melalui program pinjaman dengan bunga ringan atau bahkan tanpa bunga, seperti yang disalurkan melalui lembaga keuangan mikro daerah dan koperasi, sebagai solusi alternatif terhadap sulitnya akses perbankan konvensional bagi UMKM yang kerap terkendala jaminan atau rekam jejak keuangan yang belum memadai.

Selain itu, terdapat program pelatihan dan pengembangan kapasitas kewirausahaan yang komprehensif, mencakup aspek manajemen keuangan, pemasaran digital, standarisasi produk, peningkatan kualitas inovasi, hingga sertifikasi halal dan BPOM yang krusial untuk akses pasar yang lebih luas dan kepercayaan konsumen,

seringkali diselenggarakan melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi lokal, lembaga pelatihan profesional, dan *startup* teknologi yang relevan. Upaya yang lebih terintegrasi untuk mendigitalisasi UMKM juga digalakkan melalui inisiatif ambisius seperti “Lampung Begawi 2025” yang dirancang untuk memfasilitasi *business matching* antara UMKM lokal dengan pembeli potensial di tingkat regional maupun internasional, serta memperluas jangkauan pasar UMKM hingga ke level ekspor melalui platform digital, membuka peluang UMKM lokal untuk bersaing di pasar global yang lebih luas.

Kerangka legal formal untuk berbagai bentuk dukungan ini juga telah diatur secara komprehensif; misalnya, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Usaha Mikro secara eksplisit memberikan payung hukum yang kuat dan legitimasi bagi berbagai program pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Peraturan ini idealnya menjadi *guidance* normatif dan operasional bagi pemerintah kota untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi UMKM, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung yang berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi lokal, penciptaan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

Namun, implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dirancang dengan cermat di atas kertas ini seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dan friksi yang signifikan di lapangan, menciptakan apa yang disebut “jurang implementasi” (*implementation gap* atau *policy-practice gap*). Terdapat kesenjangan yang sistemik, struktural, dan nyata antara formulasi kebijakan yang ideal secara normatif dengan realitas empiris penerapannya, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada kesenjangan ini meliputi: kurangnya sosialisasi program yang efektif dan inklusif, yang menyebabkan banyak pelaku UMKM, terutama mereka yang berada di wilayah pinggiran kota atau tidak terhubung dengan jaringan informasi formal dan digital, tidak mengetahui keberadaan, manfaat, atau bahkan prosedur akses terhadap berbagai bentuk dukungan yang telah disediakan; kompleksitas birokrasi dan prosedur administratif

dalam proses pengajuan bantuan, perizinan usaha, atau sertifikasi produk (misalnya PIRT, Halal, BPOM), yang seringkali memakan waktu lama, menelan biaya tersembunyi, dan menuntut kelengkapan dokumen yang rumit serta berulang, secara signifikan memberatkan UMKM dengan keterbatasan waktu, sumber daya finansial, dan kapasitas manajerial; terbatasnya sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi pemerintah kota yang berbeda. Fenomena ini menyebabkan program-program dukungan menjadi parsial, tumpang tindih dalam target, atau bahkan kontradiktif dalam tujuan, secara fundamental mengurangi efektivitas dukungan secara keseluruhan dan menciptakan kebingungan serta ketidakpastian di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi.

Tingkat komitmen, kapasitas, dan koordinasi antar *stakeholder* yang meliputi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta (misalnya perbankan, perusahaan teknologi, (*e-commerce*), akademisi sebagai penyedia riset dan pendampingan, serta komunitas UMKM sebagai pelaksana dan penerima manfaat, belum sepenuhnya optimal dalam membentuk ekosistem inovasi yang terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang lemah ini menghambat penciptaan *value chain* yang kuat, di mana UMKM dapat saling mendukung, berkolaborasi dalam jaringan, dan bersinergi dalam mencapai tujuan inovasi yang lebih besar. Meskipun program pinjaman tanpa bunga berhasil meningkatkan jumlah unit usaha UMKM di Bandar Lampung secara kuantitas, namun hambatan fundamental seperti pelatihan digital yang belum masif, kurangnya pendampingan paska-pelatihan yang berkelanjutan dan terpersonalisasi, serta mindset pelaku UMKM yang masih cenderung tradisional dan resisten terhadap perubahan atau adopsi teknologi baru, menjadi faktor penentu stagnasi inovasi. Hal ini menyebabkan UMKM hanya tumbuh secara nominal tanpa diimbangi peningkatan kualitas produk, daya saing pasar, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan pasar yang dinamis, yang pada akhirnya dapat menimbulkan fenomena “UMKM mati suri” atau bahkan kebangkrutan, meski telah menerima bantuan.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh dampaknya terhadap dimensi sosial ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung yang lebih luas dan makro. Inovasi UMKM tidak hanya semata-mata tentang profitabilitas bisnis individu atau pertumbuhan ekonomi sektoral, tetapi juga secara fundamental terkait dengan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif dan penurunan angka kemiskinan.

UMKM yang inovatif akan secara langsung menciptakan lapangan kerja baru yang layak, meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Sebaliknya, UMKM yang gagal berinovasi akan rentan terhadap tekanan pasar yang terus berubah, tidak mampu bersaing dengan produk dari luar daerah atau bahkan impor, berpotensi gulung tikar, dan memperburuk kondisi sosial ekonomi lokal, menciptakan efek domino pada tingkat pengangguran, kemiskinan, dan bahkan ketidakstabilan sosial. Perspektif kebijakan dukungan yang akan dianalisis dalam penelitian ini akan memungkinkan identifikasi model-model intervensi pemerintah yang paling efektif, seperti kolaborasi dengan lembaga keuangan (misalnya, Bank Indonesia untuk program Kredit Usaha Rakyat/KUR dan Ultra Mikro/Umi yang memiliki target spesifik, mekanisme penyaluran yang teruji, dan pendampingan) atau pembangunan inkubator bisnis dan sentra kreatif yang terintegrasi. Sementara itu, analisis mendalam terhadap tantangan implementasi akan menggali akar masalah dari hambatan-hambatan nyata, mulai dari masalah adopsi teknologi yang lambat, manajemen sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas dan jaringan distribusi, hingga ketatnya persaingan pasar global yang semakin mengikis keberadaan UMKM lokal yang tidak siap.

Pasar bebas membuka peluang besar bagi UMKM yang kompeten, namun sekaligus menjadi ancaman eksistensial bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi dan berinovasi. Tanpa dukungan strategis dari pemerintah daerah yang dirancang dengan matang, dieksekusi dengan efektif, dan dievaluasi secara berkelanjutan, UMKM di Kota Bandar Lampung berisiko besar tertinggal dalam arena persaingan, kehilangan pangsa pasar yang vital, dan tidak mampu berkompetisi di kancah yang lebih luas, sehingga berdampak negatif pada perekonomian kota secara keseluruhan, memicu krisis lokal, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya pada pilar ekonomi dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini menjadi krusial dan mendesak untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan holistik mengenai “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung: Perspektif Kebijakan Dukungan dan Tantangan Implementasi”. Dengan menggali perspektif dari berbagai *stakeholder* kunci mulai dari pembuat kebijakan di berbagai tingkatan birokrasi pemerintahan kota, aparatur pelaksana program di dinas-dinas terkait, dan secara langsung dari para pelaku UMKM itu sendiri yang merasakan dampak kebijakan di lapangan penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis mengidentifikasi gap antara harapan normatif dan realitas empiris. Lebih lanjut, penelitian ini akan berupaya menemukan akar masalah dari tantangan implementasi yang kompleks dan multi-faktorial (meliputi aspek kapasitas pemerintah, partisipasi UMKM, dan dinamika lingkungan eksternal), serta pada akhirnya, merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya konkret dan realistis, tetapi juga berkelanjutan, adaptif, berbasis bukti empiris, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Harapannya, rekomendasi ini dapat menjadi pijakan kuat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyempurnakan strategi dukungan UMKM, menciptakan ekosistem inovasi yang lebih inklusif, resilien, dan mampu mengantarkan UMKM lokal menuju pertumbuhan yang berkelanjutan serta berkontribusi secara lebih optimal pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung secara menyeluruh dan berkesinambungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan substansi kebijakan dukungan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk secara spesifik mendorong inovasi dalam ekosistem UMKM, mencakup aspek akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi digital?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan dukungan inovasi UMKM tersebut, serta bagaimana perspektif dari berbagai *stakeholder* kunci (khususnya para pelaku UMKM) mengenai

kendala dan hambatan yang mereka rasakan dalam proses inovasi dan pemanfaatan dukungan pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan spesifik sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bentuk dan substansi kebijakan dukungan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya mendorong inovasi UMKM.
2. Untuk mengungkap dan mengeksplorasi secara komprehensif tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan dukungan inovasi UMKM, serta memahami perspektif para pelaku UMKM mengenai kendala dan hambatan yang mereka alami dalam berinovasi dan memanfaatkan dukungan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis, kepada berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Manfaat Teoritis (Akademis):

Pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan Kebijakan Publik: Penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, khususnya dalam domain studi implementasi kebijakan lokal. Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah, terutama dalam konteks pengembangan UMKM dan mendorong inovasi.

Kontribusi pada Studi Inovasi dan UMKM: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu inovasi UMKM, peran pemerintah daerah dalam ekosistem kewirausahaan, serta tantangan digitalisasi di sektor mikro dan kecil.

Penyempurnaan Model Implementasi Kebijakan: Melalui analisis kesenjangan antara formulasi dan implementasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru untuk penyempurnaan model-model implementasi kebijakan yang ada, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual lokal yang unik di Kota Bandar Lampung. Ini dapat menginspirasi pengembangan kerangka analitis yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas lapangan.

2. Manfaat Praktis:

Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung:

Basis Data dan Informasi: Hasil penelitian ini akan menyajikan data dan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan dukungan yang ada, serta mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan perbaikan. Ini akan menjadi basis informasi yang berharga untuk evaluasi kebijakan.

Perumusan Kebijakan yang Lebih Efektif: Penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, realistis, dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan implementasi. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai masukan langsung bagi perencana kebijakan di Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi terkait lainnya, dalam merancang program dukungan inovasi UMKM yang lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif.

Peningkatan Koordinasi dan Sinergi: Dengan mengidentifikasi kesenjangan koordinasi antar-instansi dan stakeholder, penelitian ini dapat mendorong perbaikan mekanisme kerja sama dan sinergi antar pihak untuk menciptakan ekosistem inovasi UMKM yang lebih terpadu.

Bagi Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung:

Informasi Akses Dukungan: Penelitian ini akan secara tidak langsung memberikan informasi kepada pelaku UMKM mengenai berbagai bentuk dukungan pemerintah yang tersedia, bagaimana mengaksesnya, serta apa saja potensi manfaat dan hambatan yang mungkin ditemui.

Peningkatan Kesadaran: Dengan memahami tantangan dari perspektif pemerintah, pelaku UMKM dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya proaktif dalam mencari informasi, beradaptasi, dan berinovasi.

Advokasi: Hasil penelitian yang menyoroti kendala dari sisi UMKM dapat menjadi alat advokasi bagi asosiasi UMKM atau komunitas untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

Inspirasi Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi fondasi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, baik di Kota Bandar Lampung maupun di daerah lain, dengan fokus pada aspek-aspek spesifik seperti dampak digitalisasi, peran pendampingan, atau studi komparatif kebijakan antar daerah.

Data Sekunder: Hasil penelitian, termasuk temuan dan data lapangan, dapat berfungsi sebagai data sekunder untuk kajian komparatif atau analisis longitudinal di masa mendatang.

Dengan manfaat yang komprehensif ini, penelitian tidak hanya berhenti pada pemahaman fenomena, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu cara untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan kesamaan dalam judul penelitian. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
Huda, K. (2022)	Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah	Kualitatif (wawancara dengan pejabat dinas dan pelaku UMKM, analisis dokumen kebijakan, triangulasi data).	Implementasi kebijakan terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah, kurangnya koordinasi antar dinas, dan rendahnya partisipasi UMKM akibat sosialisasi yang minim.	Memberikan perspektif daerah Lampung (dekat dengan Bandar Lampung) tentang tantangan implementasi. Penelitian ini akan membandingkan dengan konteks kota dan fokus pada inovasi.

			Rekomendasi: peningkatan monitoring dan evaluasi.	
Fitriani, R. (2021)	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM di Kota Metro, Lampung	Kualitatif (studi kasus, wawancara dengan pelaku UMKM dan pejabat, observasi lapangan).	Peran Pemda efektif dalam fasilitasi pasar dan pelatihan, namun tantangan utama adalah akses modal dan infrastruktur digital. UMKM kreatif tumbuh 12% berkat program pemerintah.	Relevan dengan peran Pemda di Lampung dan aspek ekonomi kreatif (mirip inovasi). Penelitian ini akan memperluas ke Bandar Lampung dengan fokus tantangan implementasi inovasi.
Fauzi, A. (2024)	Analisis Kebijakan Digitalisasi UMKM di Era Pasca- Pandemi: Studi Kasus Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung	Kualitatif (wawancara mendalam, analisis konten dokumen, focus group discussion dengan UMKM).	Kebijakan digitalisasi (seperti pelatihan <i>e-commerce</i>) berhasil di tingkat sosialisasi, tapi implementasi rendah karena	Sangat relevan karena lokasi sama dan fokus digitalisasi (bentuk inovasi). Penelitian ini akan mengintegrasikan dengan perspektif ganda (pemerintah dan

			literasi digital UMKM yang minim dan infrastruktur jaringan tidak merata.	UMKM) untuk analisis kesenjangan.
Nurhaliza, S. (2022)	Tantangan Implementasi Program Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.	Kualitatif (wawancara, observasi, analisis SWOT kebijakan).	Tantangan meliputi birokrasi panjang, kurangnya monitoring, dan resistensi UMKM terhadap pelatihan. Solusi: simplifikasi prosedur dan kolaborasi dengan swasta.	Memberikan wawasan tantangan implementasi di Lampung. Penelitian ini akan fokus pada inovasi sebagai variabel utama di konteks kota Bandar Lampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

2.2 Pengertian dan konsep dasar kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu administrasi negara dan pemerintahan daerah. Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu bagi kepentingan masyarakat luas. Subarsono (2021) menjelaskan kebijakan publik sebagai segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, atau memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan publik memiliki tiga unsur utama, yaitu: (1) adanya aktor pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan; (2) adanya masalah publik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan; dan (3) adanya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui solusi yang terukur dan dapat dievaluasi.

Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan publik menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi *policy making* (pembuatan kebijakan) sekaligus *policy implementation* (pelaksanaan kebijakan). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, kebijakan publik di tingkat daerah merupakan turunan dari kebijakan nasional yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan kultural daerah (Rakhmat & Yuningsih, 2022).

Menurut Dunn (2018), kebijakan publik mencakup seluruh proses yang terdiri atas lima tahap utama: (1) perumusan masalah (*problem formulation*), (2) penyusunan agenda (*agenda setting*), (3) formulasi kebijakan (*policy formulation*), (4) implementasi (*policy implementation*), dan (5) evaluasi (*policy evaluation*). Model ini memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana kebijakan publik bekerja dari tahap awal hingga hasil akhir. Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada tahapan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung.

Dalam konteks kebijakan publik untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan tidak hanya dipandang sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai bentuk intervensi strategis yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan inovasi teknologi. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan regulasi yang mendukung, pemberian bantuan modal, pelatihan, serta akses terhadap teknologi dan pasar. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam

konteks ini harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi lokal dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan global yang serba digital.

Efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kualitas perumusan kebijakan, (2) kemampuan aktor pelaksana, dan (3) tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi aktif pelaku UMKM sebagai sasaran kebijakan, kebijakan inovasi yang dibuat oleh pemerintah daerah cenderung bersifat top-down dan tidak kontekstual. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun mekanisme komunikasi dan kolaborasi yang inklusif antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, konsep dasar kebijakan publik digunakan untuk menelaah bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dukungan terhadap inovasi UMKM. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada *policy as process*, yakni melihat kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan dinamis yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan konteks sosial ekonomi. Fokus penelitian bukan pada hasil kuantitatif, tetapi pada makna dan pengalaman implementasi kebijakan sebagaimana dirasakan oleh pelaku UMKM dan aparatur pelaksana di lapangan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dasar kebijakan publik akan menjadi landasan teoritis untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung berfungsi dalam mendorong inovasi UMKM, mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas implementatif, serta menilai efektivitas dukungan pemerintah dalam konteks pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2.3 Implementasi kebijakan publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah proses mengubah keputusan politik menjadi tindakan administratif yang nyata melalui serangkaian aktivitas birokrasi, program, dan layanan publik. Artinya, implementasi bukan sekadar menjalankan perintah

hukum, tetapi juga mencakup bagaimana aparat publik menafsirkan, mengkoordinasikan, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi, implementasi kebijakan publik di daerah menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal sering kali dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya, fragmentasi kelembagaan, serta rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan struktur birokrasi, komunikasi kebijakan, dan pengelolaan sumber daya yang ada.

2.3.2 Tujuan dan Karakteristik Implementasi Kebijakan

Tujuan utama implementasi kebijakan publik adalah memastikan agar keputusan yang telah dirumuskan pada tahap formulasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari *output* administratif (seperti jumlah program yang dijalankan), tetapi juga dari *outcome* sosial berupa perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan, dan efektivitas pelayanan publik. Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Bersifat operasional, karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.
2. Menyangkut berbagai aktor, termasuk birokrasi, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah.
3. Dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi daerah yang selalu dinamis.
4. Menuntut koordinasi lintas sektor dan partisipasi publik untuk mencapai efektivitas.

Dalam administrasi publik modern, keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari kepatuhan birokrasi, tetapi juga dari kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan (*adaptive governance*).

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

1. Komunikasi, kejelasan informasi kebijakan sangat penting agar setiap pelaksana memahami tujuan dan langkah operasional kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi antarinstansi dapat menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Sumber Daya, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur. Keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM sering menjadi penyebab lemahnya implementasi kebijakan di daerah.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana , menggambarkan tingkat komitmen, integritas, dan motivasi pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
4. Struktur Birokrasi, sistem koordinasi, hierarki, dan pembagian kewenangan menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Dalam era birokrasi digital saat ini, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kemampuan lembaga pemerintah untuk bertransformasi dan menggunakan teknologi informasi dalam proses administrasi publik.

2.3.4 Implementasi Kebijakan dalam Konteks Pemerintah Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, implementasi kebijakan publik memiliki karakteristik yang lebih kontekstual. Pemerintah daerah memiliki peran ganda sebagai regulator dan fasilitator dalam menjalankan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM.

Implementasi kebijakan di daerah juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan politik kepala daerah, serta partisipasi masyarakat. Implementasi yang efektif memerlukan integrasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sehingga kebijakan menjadi lebih adaptif dan inklusif.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan publik dianalisis untuk memahami bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mengoperasionalkan

kebijakan dukungan inovasi bagi pelaku UMKM, melalui dinas teknis seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, serta Dinas Perindustrian.

2.3.5 Tantangan Implementasi Kebijakan Publik

Tantangan implementasi kebijakan publik di Indonesia umumnya mencakup:

1. Kurangnya koordinasi antarinstansi pelaksana.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia birokrasi.
3. Kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi kebijakan.
4. Minimnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam tahap pelaksanaan.

Selain itu, masih terjadi kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan (*policy gap*), terutama ketika kebijakan tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi lokal. Dalam kasus kebijakan dukungan UMKM, hal ini dapat muncul dalam bentuk bantuan yang tidak tepat sasaran, kurangnya pendampingan berkelanjutan, serta lemahnya koordinasi antar dinas.

2.4 Konsep inovasi dalam UMKM

2.4.1 Pengertian Inovasi

Inovasi adalah proses penerapan ide baru untuk menciptakan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dalam konteks UMKM, inovasi tidak hanya terbatas pada penciptaan produk baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam proses produksi, pemasaran, distribusi, dan manajemen.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023) mendefinisikan inovasi UMKM sebagai seluruh upaya kreatif yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing lokal. Dalam perspektif administrasi publik, inovasi juga dipandang sebagai hasil dari kebijakan publik yang menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan teknologi.

2.4.2 Jenis dan Dimensi Inovasi UMKM

1. Inovasi Produk, yaitu penciptaan atau modifikasi produk yang lebih menarik, berkualitas, atau sesuai kebutuhan pasar.
2. Inovasi Proses, yakni penerapan metode baru dalam produksi, manajemen, atau distribusi yang meningkatkan efisiensi.
3. Inovasi Pemasaran, meliputi strategi promosi baru, pemanfaatan media digital, dan pengembangan merek (*branding*).
4. Inovasi Organisasi, yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi, kemitraan, serta adopsi teknologi manajemen modern.
5. Inovasi Digital, untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam kegiatan bisnisnya, seperti penggunaan e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital.

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Inovasi UMKM

1. Sumber daya manusia (SDM) – Kompetensi, kreativitas, dan literasi digital pelaku UMKM.
2. Akses terhadap informasi dan teknologi – Kemudahan memperoleh informasi pasar dan pelatihan berbasis digital.
3. Akses pembiayaan dan modal usaha – Dukungan keuangan dari lembaga perbankan maupun pemerintah daerah.
4. Lingkungan kebijakan dan dukungan pemerintah – Kebijakan yang kondusif, insentif pajak, pendampingan, dan pelatihan berkelanjutan.
5. Jaringan dan kemitraan usaha – Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas, dan sektor swasta.

2.4.4 Relevansi Konsep Inovasi dengan Penelitian Ini

Dalam penelitian ini, konsep inovasi digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung mendorong pelaku UMKM untuk berinovasi dalam produk, proses, maupun strategi bisnisnya. Analisis ini juga menilai sejauh mana dukungan kebijakan pemerintah daerah mampu mengatasi hambatan struktural seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, serta minimnya jejaring pasar.

Dengan memahami inovasi sebagai proses sosial, ekonomi, dan kebijakan, penelitian ini menempatkan inovasi bukan hanya sebagai hasil ekonomi, tetapi juga sebagai indikator efektivitas kebijakan publik daerah dalam menciptakan tata kelola pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM

Dalam kerangka administrasi publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pengaturan sosial di tingkat lokal. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal mencakup dua dimensi penting: (1) sebagai aktor administratif yang menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam tindakan konkret, dan (2) sebagai aktor otonom yang merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, penelitian ini berlandaskan pada *middle theory*, karena memusatkan perhatian pada hubungan empiris antara peran pemerintah daerah, kebijakan inovasi, dan pengembangan UMKM.

Menurut Suharyono dan Lestari (2022), peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dapat dibagi menjadi empat dimensi utama yang saling melengkapi:

1. Regulator

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan, peraturan, dan insentif yang mendukung pengembangan UMKM. Misalnya, penyusunan *Peraturan Daerah (Perda)* yang memberikan kemudahan perizinan usaha, pajak ringan, dan perlindungan terhadap produk lokal.

2. Fasilitator

Pemerintah daerah menyediakan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, akses permodalan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran

produk UMKM. Fasilitasi ini menjadi wujud nyata dari fungsi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Katalisator

Pemerintah daerah berperan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas bisnis, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk membangun ekosistem inovasi yang saling menguatkan.

4. Inovator

Pemerintah daerah juga diharapkan menjadi pelaku inovasi kebijakan, yaitu menciptakan strategi baru untuk mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi.

2.6 Tantangan Implementasi Kebijakan Dukungan UMKM

2.6.1 Konteks Implementasi Kebijakan UMKM di Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, implementasi kebijakan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tanggung jawab strategis pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi lokal. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah tidak hanya diukur dari jumlah program yang diluncurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi lokal.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM sangat krusial untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan inovasi daerah. Namun, banyak kebijakan UMKM di daerah menghadapi tantangan serius dalam tahap implementasi, mulai dari lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, hingga kurangnya partisipasi masyarakat.

2.6.2 Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Birokrasi

Salah satu tantangan paling umum dalam implementasi kebijakan dukungan UMKM di daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Banyak pemerintah daerah memiliki struktur birokrasi yang kompleks namun tidak efisien,

sehingga pelaksanaan program UMKM menjadi lambat dan tidak terukur. Kapasitas aparatur pelaksana juga masih menjadi hambatan, banyak pegawai pelaksana program pemberdayaan UMKM belum memiliki kompetensi di bidang inovasi, digitalisasi, maupun manajemen bisnis. Akibatnya, implementasi kebijakan sering hanya bersifat administratif dan kurang menghasilkan dampak nyata bagi pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan dana daerah menyebabkan ketergantungan pada anggaran pusat. Kondisi ini membuat kebijakan UMKM di daerah sulit berkelanjutan karena program sering berhenti ketika dukungan anggaran dari pemerintah pusat berakhir.

2.6.3 Koordinasi Antarinstansi

Tantangan lain adalah fragmentasi kebijakan antarorganisasi pemerintah daerah. Program dukungan UMKM sering kali dijalankan oleh beberapa dinas secara terpisah seperti Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian tanpa koordinasi yang kuat. Akibatnya terjadi tumpang tindih program dan inefisiensi sumber daya. Koordinasi antar dinas sering lemah karena perbedaan prioritas kebijakan dan kurangnya sistem komunikasi lintas instansi. Dalam konteks implementasi, lemahnya koordinasi ini berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan yang tidak sinergis dan sulit dievaluasi hasilnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan *collaborative governance* yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan berpartisipasi secara aktif dan berbagi tanggung jawab dalam mendukung inovasi UMKM daerah.

2.6.4 Rendahnya Partisipasi Pelaku UMKM dan Masyarakat

Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM. Partisipasi publik dalam proses implementasi kebijakan masih rendah karena kurangnya transparansi informasi, minimnya komunikasi dua arah, serta keterbatasan literasi kebijakan di kalangan masyarakat.

Di banyak daerah, pelaku UMKM sering menjadi objek kebijakan, bukan subjek aktif yang dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program. Padahal, dalam

paradigma *good governance*, pelibatan masyarakat adalah elemen penting untuk memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan mereka tanpa partisipasi aktif masyarakat, kebijakan UMKM hanya bersifat simbolik dan sulit mencapai efektivitas implementasi.

2.6.5 Tantangan Digitalisasi dan Inovasi Teknologi

Era digital menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Namun, banyak pelaku UMKM di daerah masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, akses internet, serta kemampuan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan produksi. Kendala ini diperparah oleh kurangnya dukungan infrastruktur digital dari pemerintah daerah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023), hanya sekitar 35% UMKM di Indonesia yang sudah terhubung ke platform digital, dan sebagian besar berasal dari daerah perkotaan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan inovasi antara UMKM di kota besar dan di daerah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dukungan UMKM perlu menekankan aspek transformasi digital dan pelatihan berbasis teknologi, yang menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing dan inovasi usaha.

2.6.6 Hambatan Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan

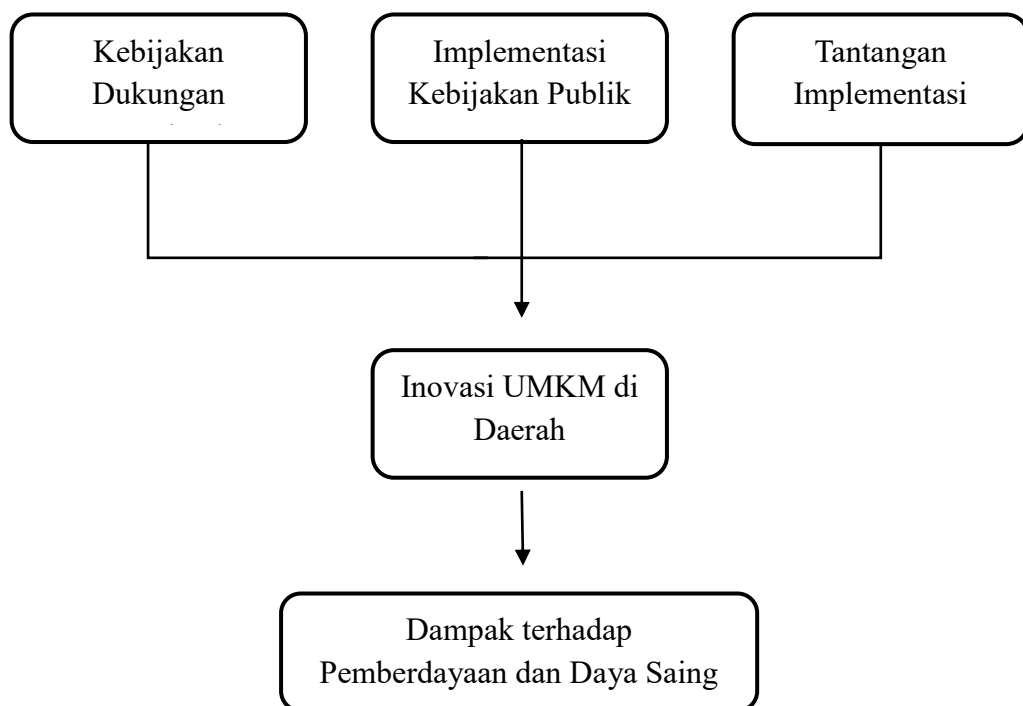
Sebagian besar kebijakan daerah tidak memiliki mekanisme evaluasi yang memadai. Pengawasan terhadap pelaksanaan program UMKM sering bersifat formalitas dan tidak menghasilkan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan. Kelemahan sistem evaluasi ini menyebabkan banyak kebijakan yang tidak berorientasi hasil (*output-based*), melainkan hanya berfokus pada pelaporan administratif (*compliance-based*). Hal ini berpotensi mengurangi akuntabilitas publik dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan daerah.

Dalam kerangka administrasi publik modern, evaluasi kebijakan seharusnya bersifat berkelanjutan dan berbasis data (*evidence-based policy*), sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan memperbaiki implementasi dari waktu ke waktu.

2.6.7 Strategi Menghadapi Tantangan Implementasi

1. Peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan, sertifikasi, dan digital literacy.
2. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan tim terpadu pengembangan UMKM daerah.
3. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam penyediaan pendampingan dan riset kebijakan.
4. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar kebijakan lebih adaptif dan akuntabel.
5. Meningkatkan partisipasi publik melalui forum UMKM daerah dan keterlibatan komunitas usaha lokal dalam perumusan kebijakan.

2.7 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penjelasan naratif dan interpretatif, bukan dalam bentuk angka atau data statistik.

Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis bersifat induktif dengan menekankan pada makna daripada generalisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial sebagaimana adanya dan menggali makna di balik tindakan serta kebijakan publik yang diamati.

Tipe deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual tentang fenomena implementasi kebijakan dukungan inovasi UMKM oleh pemerintah daerah. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan situasi, peristiwa, dan hubungan antarfenomena secara mendalam tanpa memanipulasi variabel yang diteliti.

Dalam konteks administrasi publik, metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dukungan inovasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatannya. Dengan demikian, tipe penelitian ini dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung, serta untuk menggali makna dan dinamika implementasi kebijakan dari perspektif para pelaku dan pemangku kepentingan.

Pendekatan kualitatif deskriptif ini juga memungkinkan peneliti menginterpretasikan data naratif hasil wawancara dan observasi, bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menemukan pola, makna, dan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik dan inovasi ekonomi daerah.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai arah utama dalam kegiatan penelitian agar proses pengumpulan dan analisis data tetap konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fokus penelitian kualitatif merupakan batasan ruang lingkup masalah yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk dipahami secara mendalam. Dengan adanya fokus, penelitian dapat berjalan terarah dan mendalam tanpa menyimpang dari konteks utama fenomena yang diteliti.

Penelitian ini difokuskan pada peran Pemerintah Daerah dalam mendorong inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung, khususnya melalui implementasi kebijakan dukungan inovasi serta identifikasi tantangan pelaksanaannya di lapangan. Fokus ini ditetapkan karena inovasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah di era digital.

Berdasarkan pandangan Creswell dan Poth (2023), penentuan fokus penelitian kualitatif dilakukan dengan meninjau konteks sosial yang kompleks dan menyoroti pengalaman partisipan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek kebijakan formal, tetapi juga menggali persepsi dan pengalaman pelaku UMKM, aparatur pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam menjalankan kebijakan inovasi.

Fokus penelitian ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

1. Bentuk dan pelaksanaan kebijakan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung.
2. Peran dan kontribusi instansi pelaksana (seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian) dalam mendukung pelaku usaha berinovasi.
3. Tantangan dan hambatan implementasi kebijakan inovasi UMKM di tingkat daerah, baik dari sisi birokrasi, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada makna dan dinamika implementasi kebijakan dukungan inovasi UMKM di Bandar Lampung, dengan menekankan pada proses, interaksi antaraktor, serta konteks kebijakan yang melingkupinya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan kesesuaian antara fenomena yang akan diteliti dengan ketersediaan data, aksesibilitas, dan keterlibatan informan yang mampu memberikan informasi mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan. Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis sebagai kota perdagangan dan jasa yang memiliki jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cukup besar dan beragam. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (2023), jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung mencapai lebih dari 97.000 unit usaha, yang tersebar di seluruh kecamatan dan bergerak di berbagai sektor seperti kuliner, fesyen, kerajinan, dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah meluncurkan berbagai program kebijakan dan inovasi, seperti Program UMKM Naik Kelas, Digitalisasi UMKM, serta Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berfungsi sebagai wadah konsultasi dan pelatihan bagi pelaku usaha. Program-program ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan dinamika kebijakan publik yang aktif, baik dari sisi perumusan maupun implementasi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan dukungan inovasi UMKM

diimplementasikan oleh pemerintah daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya berfungsi saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan dukungan inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi peneliti dengan informan. Data primer pada penelitian kualitatif mencerminkan pandangan, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh partisipan terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam dengan aparaturnya Pemerintah Kota Bandar Lampung (khususnya dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian) serta pelaku UMKM penerima program dukungan inovasi.
2. Observasi lapangan, yang dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan kebijakan dan aktivitas inovatif pelaku UMKM di wilayah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, maupun laporan kelembagaan yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder penting untuk memberikan konteks kebijakan dan memperkuat hasil temuan dari data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

1. Dokumen kebijakan pemerintah daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM, dan laporan tahunan Dinas Koperasi dan UKM.
2. Laporan dan publikasi resmi, seperti *Laporan Tahunan Pemberdayaan dan Inovasi UMKM 2023* dari Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023).
3. Artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas implementasi kebijakan publik dan inovasi UMKM di Indonesia.

Penggunaan data primer dan sekunder secara bersamaan membantu peneliti melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh keabsahan data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif melalui proses triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber dan metode untuk meningkatkan keabsahan temuan.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan kunci mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap kebijakan dukungan inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung. Wawancara mendalam adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk menggali makna dan pemahaman atas fenomena sosial. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan pedoman pertanyaan umum namun tetap fleksibel untuk memungkinkan informan menjelaskan secara luas berdasarkan pengalamannya.

Informan dalam penelitian ini meliputi; Aparatur pemerintah dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung; Pelaku UMKM penerima dukungan inovasi dari pemerintah daerah; Serta pihak pendukung lain seperti pendamping UMKM dan pengurus komunitas bisnis lokal.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi 30–60 menit per informan, disertai pencatatan dan perekaman untuk memastikan keakuratan data.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dalam penelitian administrasi publik penting untuk melihat kesesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi nyata di lapangan. Observasi dalam penelitian ini bersifat partisipatif pasif, yaitu peneliti hadir di lokasi kegiatan tanpa terlibat langsung, hanya sebagai pengamat terhadap interaksi, proses pelatihan, kegiatan pendampingan, serta penggunaan fasilitas UMKM. Data hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan, meliputi deskripsi tempat, waktu, kegiatan, dan interaksi antaraktor kebijakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen tertulis, foto, laporan, atau arsip resmi. Menurut Creswell dan Poth (2023), dokumen dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai bukti kontekstual yang memperkuat interpretasi peneliti terhadap hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Laporan tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (2022–2024);
- b. Data dan publikasi dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023);
- c. Peraturan daerah serta dokumen program pemerintah yang mendukung pengembangan inovasi UMKM;
- d. Artikel berita dan publikasi akademik yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan UMKM di daerah.

Dengan kombinasi ketiga teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang mendalam, kredibel, dan valid untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dukungan pemerintah daerah diimplementasikan dalam mendorong inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan data agar dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data kualitatif adalah proses berulang yang dimulai sejak pengumpulan data, meliputi kegiatan pengorganisasian, pengkodean, pengelompokan tema, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan makna yang muncul dari data lapangan.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik karena dapat menggambarkan proses berpikir sistematis dalam menafsirkan data yang kompleks secara mendalam.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak mendukung analisis.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan:

- a. Implementasi kebijakan dukungan inovasi UMKM oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. Peran masing-masing instansi dalam pelaksanaan kebijakan; dan
- c. Tantangan serta hambatan implementasi kebijakan di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk menata informasi yang telah direduksi agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Menurut Miles et al. (2020), penyajian data dapat berbentuk uraian naratif, matriks, bagan, atau tabel yang menunjukkan

hubungan antar kategori dan tema. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan:

- a. implementasi kebijakan dukungan inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung;
- b. Peran pemerintah daerah dalam mendorong inovasi; dan
- c. Faktor penghambat yang dihadapi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Moleong (2021), penarikan kesimpulan merupakan proses interpretatif untuk menemukan makna dari data yang telah dianalisis, sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data empiris.

Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar faktor yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan agar hasil analisis lebih valid dan objektif. Proses analisis dilakukan secara simultan sepanjang penelitian, sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif bahwa analisis dan pengumpulan data terjadi secara bersamaan (*concurrent process*).

Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, peneliti dapat menafsirkan data secara sistematis dan menemukan makna mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan untuk mendorong inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Validitas dalam penelitian kualitatif tidak diukur melalui angka, tetapi melalui strategi yang menjamin ketepatan interpretasi data

berdasarkan konteks yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu, serta *member check*. Kombinasi strategi ini bertujuan agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas lapangan yang dialami oleh para informan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai jenis informan. Menurut Sugiyono (2022), triangulasi sumber digunakan untuk melihat konsistensi data yang diperoleh dari responden yang berbeda, namun membahas topik yang sama.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara:

- a. pemerintah daerah (Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian);
- b. Pelaku UMKM penerima program dukungan inovasi;
- c. Pihak pendukung seperti pendamping UMKM atau asosiasi pengusaha kecil.

Perbandingan ini membantu peneliti memahami fenomena dari berbagai perspektif, serta mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan pandangan di lapangan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk menguji konsistensi temuan. Menurut Moleong (2021), triangulasi metode membantu meningkatkan keandalan data karena hasil wawancara dapat dikonfirmasi dengan observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, data hasil wawancara akan dibandingkan dengan hasil observasi lapangan dan dokumen resmi, seperti laporan kegiatan, peraturan daerah, serta data statistik dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Dengan

cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berdasarkan persepsi subjektif informan, tetapi juga didukung oleh bukti faktual.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat stabilitas dan konsistensi informasi. Wawancara dan observasi yang dilakukan pada waktu berbeda dapat memperlihatkan perubahan kondisi sosial atau kebijakan yang mungkin terjadi selama penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dalam beberapa tahap, seperti observasi awal, wawancara pendalaman, dan klarifikasi hasil sementara, untuk memastikan data yang diperoleh tetap akurat dan relevan dengan konteks terkini.

4. Member Check

Selain triangulasi, dilakukan juga member check, yaitu proses mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian interpretasi peneliti terhadap pernyataan informan

Dengan penerapan berbagai teknik keabsahan data tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipercaya, sehingga mampu menggambarkan secara akurat bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan dalam mendorong inovasi UMKM di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, P. S., Asropi, A., & Widjayanti, A. (2023). Implementasi kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 237–253.
- Anderson, J. E. (2020). *Public policymaking (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Aprilianti, R., & Arisanti, D. (2022). Strategi inovasi digital pada UMKM di era transformasi ekonomi. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik*, 4(2), 155–167.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. (2023). Laporan Tahunan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2023. https://diskopukm.bandarlampungkota.go.id/dokumen/966-LAKIP%202023%20DINAS%20KOPERASI%20DAN%20UKM%20KOTA%20BANDAR%20LAMPUNG.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2024). Tujuh tahun mendukung usaha mikro bertumbuh: Evaluasi dan tantangan. Kementerian Keuangan. <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/142/tujuh-tahun-mendukung-usaha-mikro-bertumbuh-evaluasi-dan-tantangan>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.)*. Routledge.
- Fathurrahman, A., & Yuliani, S. (2023). Tata kelola pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM berbasis inovasi. *Jurnal Administrasi Negara Indonesia*, 5(1), 55–68.
- Fauzan, A. (2024). Model implementasi kebijakan publik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938.

- Fitriani, R. (2021). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM di Kota Metro, Lampung*. [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7890/1/SKRIPSI_RINA_FITRIANI_2021.pdf
- Gulo, T. R., Mendrofa, R., & Elazhari, E. (2024). Implementasi kebijakan publik terhadap kepentingan publik berdasarkan teori administrasi negara saat ini. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 1–10.
- Huda, K. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah*. [Skripsi]. Universitas Lampung
https://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/45678/1/SKRIPSI_KHOIRUL_HUDA_2022.pdf
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2024). Arah kebijakan pengembangan UMKM & kewirausahaan 2025-2029. Kementerian Koperasi dan UKM.
https://umkm.go.id/arrah-kebijakan?utm_source=chatgpt.com
- Kurhayadi, K. (2023). Public policy implementation: A theoretical review. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 44–59.
- Maharani, T. (2023). Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Administrativa*, 10(2), 45-60.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nasution, F., & Hidayah, S. (2021). Digital innovation and business sustainability in Indonesian MSMEs. *Journal of Economics and Business Studies*, 3(1), 44–57.
- Nugroho, R. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhaliza, S. (2022). *Tantangan Implementasi Program Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan*. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Metro.
https://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/5678/1/SKRIPSI_SITI_NURHALIZA_2022.pdf
- Prasetyo, E., & Yunita, A. (2022). The role of local government in strengthening MSME innovation ecosystems. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 6(3), 212–228.
- Purba, C. S., & Warganegara, T. L. P. (2023). Pengaruh orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran UMKM fashion di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 343-360.
- Putri, M. D., & Rahmadhani, R. (2021). Peran fasilitator pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM: Studi pada Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 3(2), 112–126.
- Rachmawati, D. (2024). Evaluasi kebijakan pengembangan UMKM daerah di era digital. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Pemerintahan*, 6(1), 87–101.
- Rakhmat, M., & Yuningsih, E. (2022). *Governance dan kebijakan publik di era otonomi daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Rizal, A., & Sulastri, H. (2023). Innovation and competitiveness of MSMEs in the digital era: Evidence from regional Indonesia. *Journal of Regional Economic Development*, 8(2), 88–102.
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharyono, T., & Lestari, D. (2022). Building sustainable competitiveness through innovation in micro and small enterprises. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 7(1), 33–49.